

Pengendalian Internal Atas Penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) Pada UMKM Kepripunyecerite

Rezario Febrianta Chandra¹, Hendy Satria², Putri Dwi Novrina³, Finalesvita Br. Nasution⁴, Eric Setiawan⁵

STIE Pembangunan Tanjungpinang – ¹rezario.azra1@gmail.com

– ²hendysatria91@gmail.com

– ³pdnovrina13@gmail.com

– ⁴finalesvitanaasution@gmail.com

– ⁵ericsetiawan641@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam UMKM Kepripunyecerite telah menerapkan Pengendalian Internal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UMKM Kepripunyecerite telah menerapkan sistem pengendalian internal untuk transaksi pembayaran dan persediaan menggunakan QRIS dari beberapa bank sesuai lokasi distribusi dan jenis transaksi. Pengendalian internal dilakukan melalui beberapa langkah, seperti rekonsiliasi kas harian, penyetoran hasil penjualan tunai secara bulanan, manajemen stok minimum, dan pengeluaran kas berdasarkan laporan stok opname bulanan. Namun, pengendalian internal belum optimal karena pemilik masih menangani fungsi keuangan dan belanja langsung, sehingga berpotensi terjadi penggunaan dana usaha untuk kepentingan pribadi. UMKM ini juga menerapkan sistem pengendalian persediaan dengan melakukan stok opname bulanan, laporan persediaan, koordinasi dengan bagian desain, pemesanan bahan baku, dan produksi sesuai kebutuhan. Namun, idealnya stok opname dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dengan persediaan agar lebih efektif.

Keywords — Pengendalian Internal, Kas, Persediaan, Pembelian, UMKM

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah memberikan dampak signifikan pada cara masyarakat dan pelaku usaha mengakses serta mengelola keuangan. Salah satu inovasi utama adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2019. QRIS dirancang sebagai standar nasional untuk pembayaran digital menggunakan kode QR, dengan tujuan memfasilitasi transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sejak 2016 seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor fintech telah berkembang menjadi salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional, terutama karena potensinya untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, di mana sekitar 51% penduduk dewasa sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Peningkatan penggunaan ponsel pintar, dukungan regulasi dari pemerintah, serta pandemi COVID-19 mempercepat adopsi layanan digital, termasuk QRIS. Masyarakat telah dikenalkan dengan gaya hidup tanpa uang tunai (cashless society) atau dikenal dengan Gerakan non tunai (Situmorang, 2021).

Cashless Society adalah kalangan yang dalam transaksi keuangannya tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi sudah dalam bentuk kartu, baik berupa kartu kredit, kartu debit maupun card (Haryati, 2016). Bank Indonesia menyatakan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir, yakni mencapai 226,54 persen. Dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Transaksi digital lainnya juga mengalami peningkatan. Dari sisi nilai besar, transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) meningkat 13,42 persen yoy, sehingga mencapai Rp42.008,08 triliun (Indonesia, 2024). Untuk melakukan pembayaran elektronik atau cashless masyarakat harus melek teknologi. Penerapan sistem pembayaran elektronik berbasis QR-Code memang dinilai efisien dalam berbagai aspek (Manurung & Lestari, 2020). Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) efisiensi penerapan cashless ini sangat penting karena mampu memberikan pengaruh yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan bisnis mereka (Triagita et al., 2024).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang

Halaman 772

mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga teknologi digital (Indonesia.Go.Id, 2024). UMKM Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, berkontribusi pada perekonomian nasional, dan membawa Indonesia menuju era emas pada 2045. "Program UMKM Level Up 2024 bertujuan mendorong pelaku UMKM agar lebih ekstensif dalam mengadopsi teknologi digital. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dimana 50 persen pelaku UMKM ditargetkan sudah go digital.

Menurut data dari Kementerian Koperasi Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, sekitar 35% UMKM di Indonesia belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam operasional bisnis mereka. Meski angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, kesenjangan digital tetap menjadi masalah yang signifikan. UMKM, yang menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan mempekerjakan sekitar 96% tenaga kerja, masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi digital dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya. Di sisi lain, laporan dari Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa UMKM yang sudah mengadopsi teknologi digital berhasil meningkatkan penjualan hingga 30% melalui platform e-commerce dan media sosial. Namun, angka ini tidak mampu menutupi fakta bahwa mayoritas UMKM, terutama di daerah-daerah, belum memiliki akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Kesenjangan ini semakin memperjelas perlunya peningkatan literasi digital, pelatihan, dan infrastruktur agar UMKM dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Kompasiana, 2024).

Dalam penelitian Dayaqarsa (2021) menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh UMKM saat ini adalah tantangan yang berkaitan dengan manajerial dan non manajerial. Hambatan manajerial ini menyebabkan terjadinya proses bisnis yang tidak efisien dan berakibat pada gagalnya dalam mengambil keputusan. Menurut Dayaqarsa (2021) hambatan ini dapat teratasi dengan digitalisasi. Hal ini disebabkan karena digitalisasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik dan secara positif berpengaruh pada optimalisasi proses bisnis dan mempercepat pengambilan keputusan yang benar. Tantangan manajerial diantaranya adalah pengendalian internal atas aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan penelitian Krisdianti (2022) menunjukkan bahwa terjadinya selisih pencatatan persediaan antara catatan hasil perhitungan dan catatan persediaan bahan baku disebabkan karena perusahaan belum menerapkan sistem pengendalian secara maksimal dalam seluruh komponen pengendalian menurut COSO. Sementara dalam penelitian Ilvana (2021), pengendalian internal yang diterapkan sudah cukup baik meski belum efektif, sehingga masih terjadi selisih antara catatan fisik dan data atas persediaan.

Kesalahan dalam transaksi QRIS juga menjadi perhatian. Misalnya, transaksi ganda atau transaksi gagal dapat terjadi akibat gangguan jaringan atau kesalahan teknis lainnya. Menurut studi pada implementasi pembayaran digital di beberapa negara berkembang, kesalahan transaksi dapat berdampak buruk pada kepercayaan konsumen dan kelancaran proses bisnis (Dewi & Santoso, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian internal yang dapat memastikan setiap transaksi diproses dengan benar dan meminimalkan terjadinya kesalahan teknis. Kecurangan merupakan risiko lain yang kerap muncul dalam sistem pembayaran digital seperti QRIS. Bentuk kecurangan yang umum meliputi manipulasi data transaksi, penggunaan kode QR palsu, hingga penyalahgunaan akun pengguna oleh pihak tidak bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal dan mekanisme deteksi kecurangan yang ketat diperlukan untuk menekan risiko ini (Iskandar et al., 2023).

Berdasarkan data jumlah pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 berjumlah 14.873. Salah satunya, UMKM Kepripunyecerite dengan kode KBLI 47881 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar barang Kerajinan serta Nomor Induk Berusaha 1006230037234 yang beralamatkan di Jalan Perum. Metro Kepri III Jl. Al. Makruf B1 RT 003 RW 001 kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dengan Toko pada Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengendalian internal atas penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) pada UMKM Kepripunyecerite.

Pengendalian merupakan cara untuk mengukur kinerja bisnis dengan membandingkan standar yang telah ditentukan untuk mengetahui apakah perusahaan sedang mencapai tujuannya atau tidak. Ini dilakukan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur dan menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing - masing. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data - data di dalam perusahaan karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Komponen sistem pengendalian internal berdasarkan Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission (COSO) (Raisa Farazila, 2021) sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari seluruh komponen sistem pengendalian internal yang mampu membuat suatu organisasi perusahaan menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian ini mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang terdapat di dalam organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko pada suatu perusahaan. Sebuah risiko yang sudah diidentifikasi akan bisa lebih mudah dianalisis sehingga akan lebih mudah dalam memperkirakan tindakan untuk kemudian diminimalisir.

3. Prosedur Pengendalian (*Control Activities*)

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan ataupun prosedur yang diciptakan untuk bisa memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan juga mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin bisa terjadi.

4. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan adalah suatu upaya untuk menilai kualitas performa sistem pengendalian internal pada suatu perusahaan. Pengawasan ini dilakukan demi menemukan kekurangan dan juga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

5. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi ini sangat diperlukan oleh pihak luar perusahaan. Manajemen bisa menggunakan informasi ini dalam menilai standar eksternal. Komunikasi dalam hal ini juga melibatkan penyediaan atas suatu pemahaman yang lebih jelas terkait peran dan tanggung jawab seseorang yang berkaitan dengan pengendalian internal pada laporan keuangan.

Di bawah ini ada beberapa konsep dalam pengendalian internal. Konsep ini biasanya diterapkan di beberapa perusahaan atau organisasi untuk tujuan perusahaan masing - masing.

1. Pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Meski terlihat bahwa pelaksanaan pengendalian internal ini melibatkan seluruh anggota, namun tetap saja secara struktur manajemen yang bertanggung jawab.
2. Memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Hal itu terjadi karena banyak pertimbangan mengenai kebutuhan, biaya, dan tujuan lain.
3. Pengendalian internal memiliki keterbatasan. Pelaksanaan ini tidak selalu efektif, tergantung pada kompetensi dan keandalan pelaksananya.
4. Sistem pengolahan data dalam pengendalian internal berguna untuk mengembangkan informasi terkait tujuan dari perusahaan.
5. Pengendalian internal memiliki tujuan dalam laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi tumpang tindih.
6. Pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses pengembangan dalam akuntansi. Pengendalian internal ini adalah langkah komprehensif dan terintegrasi serta tidak ditambahkan dalam infrastruktur perusahaan.

Inilah beberapa tujuan evaluasi yang akan menguatkan maksud dari dibutuhkannya evaluasi di dalam organisasi, perusahaan, pendidikan, mau pun diri sendiri, diantaranya:

1. Memeriksa seberapa akurat kemahiran kompetensi seseorang yang telah ditentukan.
2. Untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut dalam pekerjaannya sehingga dia dapat membuat diagnosis dan menawarkan kemungkinan remedial.

3. Menilai efisiensi dan efektifitas metode, media dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi evaluator untuk mengatasi kekurangan yang ada, hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha yang termasuk golongan UMKM yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Undang-undang tersebut juga memisahkan UMKM menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kriterianya masing-masing. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 dengan omzet tahunan maksimal Rp300.000.000,00. Sementara usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 dan omzet lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00 per tahun. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 dan omzet tahunan Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada mengoptimalkan pengendalian internal atas penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) pada UMKM Kepripunyecerite.

Penelitian dilakukan pada UMKM Kepripunyecerite yang tempat produksi beralamat di Jalan Perum. Metro Kepri III Jl. Al. Makruf B1 RT 003 RW 001 kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan toko di Bandara Raja Haji Fisabilillah Gate Keberangkatan Lantai 2. Kepripunyecerite merupakan bisnis usaha kecil menengah yang kegiatan usahanya dibidang penjualan merchandise atau oleh-oleh khas Kepulauan Riau.

Penelitian ini merupakan studi operasional yang berfokus pada analisis lingkungan internal usaha perdagangan di UMKM Kepripunyecerite.

Untuk mendukung penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan pemilik dan karyawan UMKM Kepripunyecerite. Wawancara ini mencakup beberapa pertanyaan terkait dengan pengendalian internal atas penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup hasil penelitian sebelumnya, literatur, dan data dari objek penelitian yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

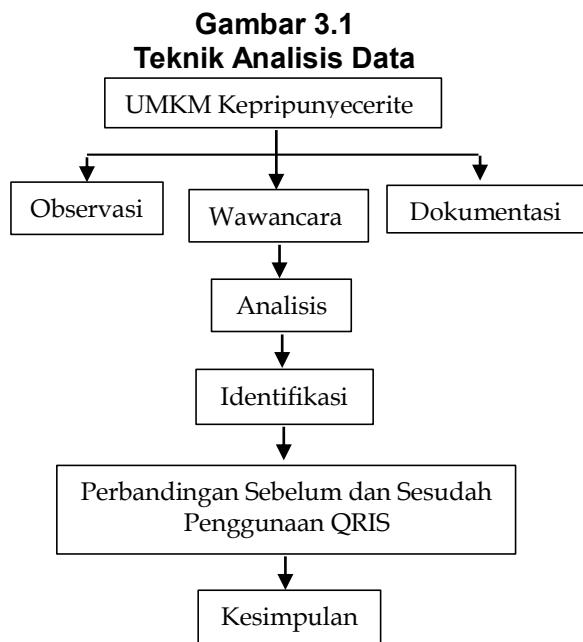
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses evaluasi yang berkaitan dengan hubungan antar variabel yang tengah diinvestigasi. Tujuan utama dari analisis data kualitatif adalah agar peneliti memperoleh pemahaman yang dalam terkait dengan hubungan variabel-variabel tersebut, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka, sebagaimana yang umumnya terjadi pada analisis kuantitatif.

Prinsip utama dari teknik analisis data kualitatif adalah mentransformasi dan menganalisis data yang terhimpun menjadi informasi yang terstruktur, sistematis, dan bermakna. Teknik Analisis Data dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan obeservasi, wawancara dan dokumentasi;
2. Melakukan analisis;
3. Melakukan identifikasi;
4. Membandingkan sebelum dan sesudah penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS);

5. Menyimpulkan kualitas laporan laba rugi sesudah UMKM Kepripunyecerite menggunakan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS).



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mengetahui pentingnya pengendalian internal atas metode pembayaran yang disediakan pada Toko. UMKM Kepripunyecerite menggunakan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) dari bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BNI yang diperuntukannya dibedakan untuk setiap toko atau jaringan distribusi. QRIS dari Bank Mandiri digunakan pada Toko yang berada di Bandara Raja Haji Fisabilillah dikarenakan telah melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri atas kegiatan Mandiri Bintan Marathon dimana Bandara Raja Haji Fisabilillah sebagai gerbang masuk para runners. QRIS dari Bank BNI digunakan untuk transaksi di tempat produksi seperti jika terdapat pelanggan yang membeli langsung ketempat produksi atau melalui sosial media (Instagram). QRIS dari Bank BCA digunakan untuk transaksi di pulau penyengat melalui gerai Tour and Travel Pulaupenyengat.id.

Dalam melakukan pengendalian internal UMKM Kepripunyecerite melakukan langkah sebagai berikut:

1. Transaksi penjualan menggunakan QRIS maupun Tunai akan dilakukan rekonsiliasi kas dimana Owner akan melakukan penarikan transaksi penjualan harian pada masing-masing QRIS berdasarkan laporan dari setiap Distribusi penjualan. Pada pembayaran secara Tunai, Owner melakukan perhitungan selisih uang kembalian pada Toko di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) sebesar Rp. 150.000 uang pecahan;
2. Pemilik melakukan penyetoran uang hasil penjualan tunai yang dilakukan secara bulanan ke rekening penampungan;
3. Melakukan manajemen minimal stok untuk semua Distribusi penjualan;
4. Pengeluaran kas berdasarkan pengajuan bagian produksi berdasarkan laporan stok opname yang dilakukan setiap bulan;

UMKM Kepripunyecerite telah mengimplementasi beberapa unsur pengendalian internal atas transaksi penerimaan kas. Namun, masih terdapat pengendalian internal yang belum dilakukan secara maksimal yakni fungsi keuangan dan belanja masih dilakukan secara langsung oleh Pemilik sehingga dapat terjadi salah guna uang hasil usaha antara kepentingan usaha dengan kepentingan pribadi Pemilik. Seharusnya terdapat satu fungsi pengecekan stok opname setelah pemesanan persediaan dilakukan. Melalui langkah tersebut dapat menghindari penyalahgunaan uang hasil usaha yang dimaksud.

Sistem pengendalian atas pembelian persediaan yang diimplementasikan oleh UMKM Kepripunyecerite meliputi:

1. Pemilik akan melakukan stok opname setiap bulan;
2. Pemilik akan membuat laporan Persediaan yang akan di produksi;

3. Pemilik akan melakukan koordinasi dengan Bagian Design untuk membahas mengenai produk apa yang akan di produksi;
4. Pemilik melakukan order ke Persediaan Bahan Baku;
5. Bagian produksi akan memproduksi produk sesuai jumlah yang telah ditetapkan;

Pada UMKM Kepripunyecerite stock opname telah dilaksanakan sesuai dengan teori, di mana di dalam teori sistem pengendalian internal atas persediaan, stock opname harus dilaksanakan oleh bagian yang terbentuk dari pegawai yang bukan berasal dari fungsi yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan persediaan yakni Pemilik

4. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UMKM Kepripunyecerite telah menerapkan sistem pengendalian internal untuk transaksi pembayaran dan persediaan menggunakan QRIS dari beberapa bank sesuai lokasi distribusi dan jenis transaksi. Pengendalian internal dilakukan melalui beberapa langkah, seperti rekonsiliasi kas harian, penyetoran hasil penjualan tunai secara bulanan, manajemen stok minimum, dan pengeluaran kas berdasarkan laporan stok opname bulanan. Namun, pengendalian internal belum optimal karena pemilik masih menangani fungsi keuangan dan belanja langsung, sehingga berpotensi terjadi penggunaan dana usaha untuk kepentingan pribadi. UMKM ini juga menerapkan sistem pengendalian persediaan dengan melakukan stok opname bulanan, laporan persediaan, koordinasi dengan bagian desain, pemesanan bahan baku, dan produksi sesuai kebutuhan. Namun, idealnya stok opname dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dengan persediaan agar lebih efektif.

Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca, UMKM Kepripunyecerite dan pihak kepentingan lainnya. Maka dari hasil penelitian saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan kepada peneliti selanjutnya lebih mendalami perbandingan antara keunggulan dari seluruh Bank yang menyediakan Merchant Pembayaran sejenis QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayaqarsa, (2021). Driving Productivity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Indonesia Through Digitalization.
- Dewi, A. & S. T., (2021). Analisis Risiko Penggunaan Teknologi Pembayaran Digital di Negara Berkembang. *Jurnal Teknologi Finansial*, Volume 5(3), pp. 235-245.
- Haryati, D., (2021). Fenomena Cashless Society pada Generasi Milenial dalam Menghadapi Covid - 19. *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, Volume 3.1.
- Ilvana, Y., (2021). Analisis Pengendalian Internal dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi pada Stock Gudang Fiya Baby Shop Kota Tegal. *Politeknik Harapan Bersama*.
- Indonesia.Go.Id, (2024). *Transaksi QRIS Melonjak 226,54%, Revolusi Pembayaran Digital di Indonesia*. [Online]
Available at: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8434/transaksi-qris-melonjak-226-54-revolusi-pembayaran-digital-di-indonesia?lang=1>
[Accessed 31 Oktober 2024].
- INDONESIA.GO.ID, 2024. *UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis*. [Online]
Available at: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis?lang=1#:~:text=Menurut%20data%20terbaru%20dari%20Kementerian,kerajinan%20angan%2C%20hingga%20teknologi%20digital>
[Accessed 24 Oktober 2024].
- Iskandar, M. S. R. & L. S., (2023). Deteksi dan Pengendalian Kecurangan dalam Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Volume 4(1), pp. 102-116.
- Kompasiana, 2024. *Kurangnya Pengetahuan Digital pada UMKM menjadi Tantangan dalam Era Digital*. [Online]
Available at:
<https://www.kompasiana.com/rifkyaryo3883/66dda373c925c45a834adf73/kurangnya-pengetahuan-digital-pada-umkm-menyediakan-tantangan-dalam-era-digital>
[Accessed 24 Oktober 2024].

- Krisdianti, D., (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Persediaan Dengan Menggunakan Kerangka Kerja COSO (Studi Kasus pada UMKM Warung Kopi Limarasa Bandung). *Evaluation Of The Implementation Of The Internal Control System In Prevent*, Volume 2(2), pp. 422-435.
- Manurung, E. A. p. & L. E. A. P., (2020). Kajian Perlindungan EPayment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(1)(<https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24323>), p. 28.
- Situmorang, M. K., (2021). engaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompet Digital) Sebagai alat Pembayaran pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kota Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1)(<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6646>), pp. 123-130.
- Triagita, A. A. N. Y. D. W. & L. Z. N., (2024). ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN TRANSAKSI NON TUNAI (CASHLESS) TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM. Volume 2, p. 876–885.